

PENERAPAN METODE KAS MENUJU AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Indah Ramadhani Amir

Indahramadhani9393@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang di peroleh melalui observasi, wawancara langsung, serta dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk di interpretasi untuk mengetahui penerapan basis kas menuju akrual telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode kas menuju akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan SAP PP No.71 Tahun 2010. Termasuk pengakuan terhadap suatu transaksi yang terjadi diakui berdasarkan metode kas menuju akrual.

Kata Kunci : Kas Menuju Akrual, Laporan Keuangan, PP No.71 Tahun 2010

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of method cash toward accrual on financial reports at Regional Office of Manpower and Transmigration of South Sulawesi. The data used in this study is primary data collected through an observation, interview, and documentation. Data analysis uses qualitative descriptive method to interpretation the implementation of method cash toward accrual on financial reports significant with PP No.71 in 2010.

The result of the study using qualitative descriptive method showed that implementation of method cash toward accrual significant with Government Accounting Standart according to PP No. 71 in 2010. The financial reports of Manpower and Transmigration Office is the financial reports who be answered according to PP No.71 in 2010. Including recognition of a transaction that happened be approved according cash toward accrual method.

Keyword : Cash Toward Accrual, Financial Reports. PP No.71 in 2010

PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berbagai perkembangan dalam penatausahaanpun dilakukan demi menghasilkan konsep yang baik. Salah satu perkembangan yang dihasilkan adalah kebijakan sistem akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan

daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan bias semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya era baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004. Ketiga Undang-Undang ini mengamankan tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti praktik terbaik taraf internasional (international best practices) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basis). Setelah aturan SAP berbasis akrual ditandatangani maka pemerintah pusat dan daerah harus sudah menerapkan SAP per 1 Januari 2015, dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, sebagai amanat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003 mengamankan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah di minta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada tahun 2015.

Diharapkan manfaat basis akrual secara nyata dalam menyajikan informasi atau seluruh aktivitas yang terjadi. Dan diharapkan laporan keuangan pemerintah dewasa ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sangat komprehensif. Sehingga manfaat laporan keuangan itu dapat berarti bagi keputusan ekonomi politik kedepannya.

Akan tetapi penerapan basis akrual yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 pada kebanyakan instansi pemerintah belum begitu optimal. Masih banyak instansi pemerintah yang belum menerapkan basis akrual. Oleh karena itu instansi yang belum menggunakan metode akrual, mengacu kepada metode kas menuju akrual. Metode kas menuju akrual ini adalah basis transisi, yang cukup bagus dalam standar akuntansi pemerintahan. Karena dari basis kas dan harus beralih ke basis akrual cukup memberikan perubahan yang luas, sehingga perlu tahap transisi yaitu menggunakan basis kas menuju akrual.

Basis akuntansi begitu sangat penting dalam laporan keuangan. Basis akuntansi diatur dalam standar akuntansi pemerintah (SAP). Aturan basis merupakan aturan tentang kapan dampak dari suatu transaksi diakui. Kesesuaian dalam menerapkan basis yang sudah tepat sesuai standar akuntansi pemerintah yang mengatur membantu menghasilkan laporan yang baik. Dan sebaliknya menerapkan basis yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang mengatur menghasilkan laporan yang tidak baik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi dimaksudkan untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sebagai basis atau dasar akuntansi pencatatan. .Basis akuntansi adalah himpunan dan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut (Sudaryo, 2017:53).

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya/belanja (expenditure). Ada dua basis dalam akuntansi, yaitu basis kas menuju akrual (cash towards accrual) dan basis akrual (accrual basis). Selain itu, dikenal juga basis kas modifikasi (modified cash basis) dan basis akrual modifikasi (modified accrual basis). Untuk organisasi pemerintah, penggunaan basis kas dan basis akrual dapat dimodifikasi.

Basis sangat menentukan arah dari laporan keuangan karena basis merupakan dasar cara atau prinsip pengakuan pencatatan transaksi. Perhatian terhadap penggunaan basis akuntansi sangat perlu. Terutama dalam penerapan basis kas dan basis akrual selama ini dalam

pengakuan pencatatan transaksi. Setiap basis sangat diperlukan entah basis kas, kas menuju akrual maupu basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan, mengingat kelemahan kelemahan yang mungkin terjadi dari basis tunggal.

Basis akuntansi yang digunakan di pemerintahan, yaitu:

Basis kas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas menuju akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Basis Akrual

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu dasar akuntansi yang mana permasalahan ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan tertuang pada laporan keuangan disaat transaksi tersebut dilakukan, tidak memperhatikan jangka kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, akuntansi berbasis akrual memperhatikan durasi waktu apa yang dicatat apakah sudah benar dengan arus sumber daya, maka informasi yang disediakan akan bersifat komprehensif dimana semua arus sumber daya tercatat (Andriasari & Prabowo, 2022).

Pengertian basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 paragraf 8 PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Sudaryati & Permana, 2020)

Basis akrual pada akuntansi pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Pada intinya basis akrual mengakui suatu transaksi apabila transaksi telah terjadi tanpa ada atau menunggu kas diterima lalu dicatat. Pada basis kas transaksi diakui apabila ada penerimaan kas. Terdapat perbedaan yang cukup jelas dan tegas antara metode basis kas dan metode basis akrual. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 basis akrual merupakan dasar akuntansi yang menerima asset, pendapatan, beban, utang, dan modal pada laporan finansial dengan berbasis akrual, serta menerima terkait belanja, pendapatan, dan pembiayaan pada laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan penggunaan basis akrual (accrual basis) adalah memberikan gambaran yang utuh terhadap posisi keuangan suatu entitas. Karakteristik sistem akuntansi berbasis akrual adalah:

- a. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya.
- b. Penyajian beban dilakukan sesuai dengan periode terjadinya.
- c. Beban yang dibayar di muka disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan.
- d. Kewajiban disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan, sehingga mencerminkan kewajiban yang sesungguhnya terjadi pada periode tersebut.
- e. Penghapusan piutang tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui pembentukan cadangan kerugian piutang.

Sistem akuntansi akrual mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut:

- a. Menggambarkan posisi keuangan organisasi secara lebih akurat.
- b. Pengitungan surplus/defisit pada suatu periode menjadi lebih realistis.
- c. Konsisten dengan prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya pada periode yang sama (prinsip matching).
- d. Mencerminkan kinerja periodik organisasi sesungguhnya.
- e. Meningkatkan akuntabilitas.
- f. Memudahkan manajemen untuk melakukan analisis untuk tujuan pengambilan kebijakan tertentu.

Meski lebih mencerminkan kinerja yang lebih realistis, penggunaan basis akrual juga mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. Diperlukan pemahaman akuntansi yang lebih baik, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal di bidang akuntansi.
- b. Adanya risiko piutang tak tertagih tetap tercatat sebagai pendapatan, sehingga pendapatan dicatat terlalu tinggi.
- c. Pembentukan cadangan kerugian piutang mengurangi pendapatan pada suatu periode.
- d. Karena dibentuk melalui suatu estimasi yang seringkali bersifat subyektif, menimbulkan risiko penyajian laporan keuangan yang tidak menggambarkan yang sebenarnya.

3. Basis Kas Menuju Akrual

Pada pencatatan berbasis kas merupakan salah satu metode akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi pada saat ada penerimaan dan pengeluaran kas namun, tidak terjadi pengakuan dan pencatatan aset dan kewajiban (Qintharah & Khomsiyah, 2022).

Menurut Halim (2008:49) basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan menurut Sudaryo et.al (2017:43) basis akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui transaksi peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual tanpa memperhatikan waktu kas diterima dan dibayarkan (Airlangga, 2016)

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Berikut kekurangan dari basis kas menuju akrual:

- a. Belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan (hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas – financial assets).
- b. Tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena
- c. Beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya
- d. Kurang memberikan jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas
- e. Hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003
- f. Informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan). Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem.

METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan suatu konsep atau cara untuk mencari, memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh (Anggraini & Oliver, 2019).

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu melalui hasil observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Sementara data sekunder yaitu

data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu observasi (pengamatan), interview dan studi dokumentasi.

5. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis hasil penerapan basis kas menuju akrual pada laporan keuangan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan dan disesuaikan dengan pedoman standar akuntansi pemerintah. Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif yang sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
- b. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan atau keputusan.
- d. Pengambilan keputusan, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit organisasi atau lembaga daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gabungan dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPh Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menindaklanjuti Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonomi serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dari itu dibentuklah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM 12, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa bidang fokus seperti; bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan social, bidang pengawasan ketenagakerjaan, bidang ketransmigrasian.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Data Wawancara

Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala sub.bagian keuangan dan bendahara pengeluaran, tentang penerapan metode kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

1. Wawancara Bapak Andrianzah Azis,S.Sos.,M.Si (Kepala Sub.Bagian Keuangan).

a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan apakah basis akuntansi yang digunakan?

- Jawaban bapak andri : *"basis akuntansi yang diimplementasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan basis kas menuju akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku"*.

b. Kapan basis akuntansi kas menuju akrual diimplementasikan pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi?

- Jawaban bapak andri : *"akuntansi kas menuju akrual itu mulai diberlakukan pada saat PP No.71 Tahun 2010 diterbitkan. Tapi pemprov kasih kebijaksanaan untuk pelaksanaannya baru dilaksanakan awal tahun 2015 sesuai dari kebijakan PP itu sendiri"*.

c. Apakah yang membedakan penerapan basis akuntansi ini dan sebelum penerapannya?

- Jawaban bapak andri : *"sebelum basis akuntansi kas menuju akrual basis yang digunakan merupakan basis kas. Dengan adanya basis kas menuju akrual kami merasa lebih baik dalam pengakuan transaksi"*.

d. Bagaimana penerapan basis kas menuju akrual pada akuntansi aset?

- Jawaban bapak andri : *"penerapan pada akuntansi aset kami mengikuti peraturan standar akuntansi pemerintah terutama PP No.71 Tahun 2010. Pada dasarnya mengakui aset berdasarkan basis akrual"*.

e. Apakah kendala yang dialami pertama kali saat PP No.71 Tahun 2010 diimplementasikan?

- Jawaban bapak andri : *"kendala yang dialami pertama kali pada saat PP No.71 Tahun 2010 ini diterapkan untuk saya sedikit merasa bingung karena pengalaman pertama bagi saya"*.

2. Wawancara ibu Jumriati, SE (Bendahara Pengeluaran)

a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan apakah basis akuntansi yang digunakan?

- Jawaban ibu jumriati : *"basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010"*.

b. Kapan basis akuntansi kas menuju akrual diimplementasikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi?

- Jawaban ibu Jumriati : *"setahu saya awal-awal akrual muncul dan gencar gencarnya pada saat menjelang akhir tahun 2014. Orang-orang provinsi bilang awal tahun 2015 harus sudah diterapkan karena PP-nya sudah terbit dan mau tidak mau tahun 2015 harus dijalankan"*.

c. Apakah yang membedakan penerapan basis akuntansi kas menuju akrual dengan sebelumnya?

- Jawaban ibu Jumriati : *"saya sangat mendukung sistem akuntansi saat ini dari pemerintah, dan dengan diterapkannya PP No. 71 Tahun 2010 ini pertama kalinya cukup bingung akan tetapi setelah sudah terbiasa saya merasa membuat laporan keuangan menjadi lebih praktis"*.

d. Bagaimana penerapan basis kas menuju akrual pada akuntansi aset?

- Jawaban ibu Jumriati : *"dalam pencatatan aset daerah berkaitan dengan aturannya laporan aset di disnakertrans harus sesuai dengan pencatatan aset di pemprov"*.

e. Apakah kendala yang dialami pertama kali pada saat PP No.71 Tahun 2010 diimplementasikan?

- Jawaban ibu Jumriati : *"kendala yang dialami dalam penggunaan basis kas menuju akrual adalah apabila ada kesalahan dalam mengakui suatu transaksi maka untuk mengoreksi kembali membuat saya cukup bingung tetapi sekarang saya merasa sudah terbiasa"*.

3. Analisis dan Pembahasan

a. Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil bahwa penerapan basis akuntansi yang digunakan merupakan basis kas menuju akrual dimana sesuai dengan SAP PP No 71 Tahun 2010. Basis Kas Menuju Akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas secara akrual dan LRA secara kas. Pendapatan dan belanja pada aset, kewajiban, dan ekuitas semuanya diungkapkan berdasarkan basis akrual. Dan khusus untuk LRA pendapatan dan belanja harus di dasarkan pada basis kas. Basis kas pada laporan LRA bertujuan untuk menghasilkan laporan yang benar sesuai dengan keadaan kas. Berdasarkan SAP PP No 71 Tahun 2010 laporan keuangan SKPD meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penerapan basis kas menuju akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di implementasikan pada awal tahun 2015. Implementasi tersebut berdasarkan kebijakan dari pemerintah provinsi dalam rangka melaksanakan/menerapkan PP No 71 Tahun 2010 yang menyatakan dapat diberlakukan selambat lambatnya lima tahun setelah PP tersebut di sahkan.

Oleh karena itu awal tahun 2015 seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Selatan diwajibkan telah menerapkan PP No 71 Tahun 2010 terutama berkaitan dengan basis akuntansi yang digunakan.

Dengan adanya basis ini proses akuntansi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi lebih mudah dan cukup praktis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak lagi harus menunggu kas diterima dalam melakukan pencatatan akuntansi karena sedikit menjadi lebih rumit dan menjadikan pencatatan dan pengakuan lebih lama dan tidak praktis. Proses akuntansi dalam mengakui suatu transaksi semuanya dilaksanakan dengan bantuan aplikasi dimana secara akrual pengakuan transaksi tersenut secara otomatis terinput. Dan seluruh pos pos akuntansi yang tersedia secara sistematis menampilkan hasil jurnal dari transaksi yang terjadi.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Dalam hubungannya dengan itu peraturan mengenai basis akuntansi juga diatur dalam SAP terutama PP No 71 tahun 2010. Yang artinya aturan mengenai basis akuntansi mempunyai peranan yang penting dari seluruh rangkaian standar yang harus ditentukan. Letak esensi dari basis akuntansi tersebut yaitu pada dukungan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan merupakan output dari seluruh peristiwa ekonomi. Laporan keuangan disajikan pada akhir periode yang telah melalui proses proses pengukuran dan pencatatan dari awal periode berjalan. Dan pemilihan penggunaan basis akuntansi menjadi ukuran dalam pengakuan transaksi selama periode agar diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan juga ditentukan dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang mana kelalaian dalam penerapan basis akuntansi juga termasuk ketidaksesuaian dengan SAP terutama PP No 71 Tahun 2010.

b. Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan basis kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Penerapan metode kas menuju akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan pada tahun 2015 sebagai bentuk pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengharuskan seluruh SKPD menerapkan standar Akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan berdasarkan pedoman PP No.71 Tahun 2010. Termasuk pengakuan terhadap suatu transaksi yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diakui berdasarkan basis kas menuju akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriasari, W. S., & Prabowo, A. (2022). Analisa Keberhasilan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Magelang. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 19(1), 101–110. <https://doi.org/10.37476/akmen.v19i1.1871>
- Angelicca, Maya. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Anggraini, A. R., & Oliver, J. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://repository.unpas.ac.id>
- Asmah, N. U. R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. M. (2022). Pengelolaan Keuangan Aset Dan Daerah (Bpkad) Kota Makassar.
- Bhrellian Narendro Putri.2016. . Akuntansi. Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya.
- Elsye, Rosmery., Dadang Suwanda dan Muchidin. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hariyanto, A. (2015). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Padahal pada akhir tahun 2010, pemerintah telah menerbitkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi. *Dharma Ekonomi*, 36. <file:///C:/Users/USER/Downloads/44-142-1-PB.pdf>
- Hasmi, N., & Sunarsi, S. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2. <https://www.ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/956>
- Kapojos, P., Maramis DPE Saerang, J., Dotulong, L., Soepeno, D., Marshall Kapojos, P., Barends Maramis, J., Paul Elia Saerang, D., Otto Herman Dotulong, L., & Soepeno, D. (2022). "Substansi Mengungguli Bentuk Formal" Atau "Bentuk Formal Mengungguli Substansi" ? Application of a Principle in Government Financial Reporting "Substance Over Form" or "Form Over Substance? 10(2), 1082–1089.
- Mahmudi,(2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Profitabilitas, D., Implikasinya, D. A. N., & Nilai, T. (2023). *Jurnal maneksi* vol 12, no. 1, maret 2023. 12(1), 58–70.
- Qintharah, Y. N., & Khomsiyah. (2022). Paradigma Thomas Kuhn: Revolusi Pencatatan Akuntansi Dari Kas Basis Menuju Accrual Basis. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 83–92. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Sinjal, J. F. (2022). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Analysis of Recording and Reporting of Budget Realization Reports in Regional Work

- Units at Th. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 6(1), 345–354.
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>
- Sudaryo, Yoyo, et.al, 2017. "Keuangan Di Era Otonomi Daerah". Edisi 1, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sukamulja, Sukmawati. 2019. Analisis Laporan Keuangan. ANDI, Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2018. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI. Alfabeta, Bandung.
- Wijayanti, Nur. 2018. Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Pada SKPD Kabupaten Sragen. Skripsi. IAIN Surakarta, Surakarta.